

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

M Taufik Makaro, (2013), *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Dewi DS dan A. Syukur Fatahillah, (2011), *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing.

John O. Haley, (2011), *Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice*, dalam *Washington Journal of Law and Policy*, Volume 36.

Agus Rusianto, 2005, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.

Keputusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor:096/KMA/SK/VII/2011 tentang Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan Penting pada tanggal 1 Juli 2011.

Anonymous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Djisman Samosir, *Segenggam tetang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Philipus M Hadjon, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.

Budi Setyawan, *Penerbitan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejaksaan Agung RI Dalam Penanganan Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Semangat Penegakan Hukum Di indonesia*, Makalah.

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

B. Jurnal

Wendy dan Andi Najemi, “*Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*”. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535>

Sulistani, Hafrida, dan Yulia Monita, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/25352/15711>

Tri Nada Sari, Elly Sudarti, dan Yulia Monita, “*Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi*”. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13716/11941>

Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, “*Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*”, PAMPAS : Journal of Criminal Law, Vol 1 No. 2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084>

Sahuri Lasmadi, “*Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2015. <https://online-journal.unja.ac.id/jelt/article/view/2149>

Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi “*Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Thn. 2019.

Fadhil Zumhana, (2015), *Disertasi Doktor: Restorative Justice Sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Surabaya: Universitas Airlangga.

John O. Haley, (2011), *Beyond Retribution An Integrated Approach To Restorative Justice*, dalam *Washington Journal of Law and Policy*, Volume 36.

Dewi DS dan A. Syukur Fatahillah, (2011), *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing.

Henny Saida Flora, (2018), *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Indonesia*, UBELAJ Jurnal, Volume 3, Issue 2.

I. Tajudin dan Nella Sumika Putri, (2015), *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan*, PADJAJARAN Jurnal, Volume 2, Nomor 1.

Halena Hestaria, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, (2022), *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelesaian Keuangan Negara*, Universitas Pendidikan Ganesha : e-Journal Volume 5 November 2022.

Johana Olivia Rumajar, e-journal: *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol.III/No. 4/ Agustus-November/2014.

Marfuatul Latifah, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Info Singkat vol V, No. 11/1/P3DI/Juni/2013, Jakarta.

I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Universitas Udayana, Bali, 2014.

Ofriyanto Lantu, e-journal: *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP*, Lex Crimen Vol. IV/No.8/Hlm. 58/Okt/2015.

C. Website

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada tanggal 5 mei 2023 pukul 22.06

<https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf> diakses pada tanggal 1 Februari 2023, Pukul 23.55

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 11.14

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/01100041/apa-itu-sp3-> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 21.07

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 21.11

<https://news.detik.com/berita/d-5357960/kasus-korupsi-dana-desa-rp-300-juta-kades-di-bengkulu-ditahan-kejaksaaan> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 14.20

Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 00.35.

Dylan Aprialdo Rachman, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp9,289* <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/14/16110731/usulan-icw-soal-pejabat-yang-tak-bisa-mempertanggungjawabkan-harta> diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.03